



**PEMERINTAH KOTA BATAM**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN**  
**PERTAMANAN**

Jl. Kartini 1 No. 29 Sei. Harapan Sekupang Telp. (0778) 8016062, Fax. (0778) 8016062  
Email : [perakimtan@batam.go.id](mailto:perakimtan@batam.go.id)  
BATAM

Kode Pos. 29425

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,**  
**PERMUKIMAN, DAN PERTAMANAN KOTA BATAM**

Nomor : KPTS. *00* /RP.04.00/I/2023

**TENTANG**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN**  
**RAKYAT, PERMUKIMAN, DAN PERTAMANAN KOTA BATAM**

**KEPALA DINAS,**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Utama di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam dalam suatu Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun...

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/m.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Tentang Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka...



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Walikota Batam Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah;
10. Peraturan Walikota Batam Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan;
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 119);
12. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama digunakan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing bidang di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas...

menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026.

- KEDUA : Penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Kepala Dinas dan disampaikan kepada Walikota Batam;
- KETIGA : Inspektorat Daerah Kota Batam wajib :
- a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja Pemerintah Kota Batam dalam rangka;
  - b. menyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
  - c. Melakukan evaluasi terhadap pelaksana Keputusan ini dan melaporkan kepada Walikota Batam.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Batam  
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

Kepala Dinas Perumahan Rakyat,  
Permukiman, dan Pertamanan  
Kota Batam



PEMERINTAH KOTA BATAM  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT,  
PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN

Drs. Eryudhi Apriadi  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196904251989091001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas  
Perumahan Rakyat,  
Permukiman dan Pertamanan  
Kota Batam

Nomor : KPTS. /RP.04.00/I/2023

Tanggal : Januari 2023

**SKPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN  
PERTAMANAN**

**a. TUGAS POKOK:**

1. Memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Perumahan Rakyat, Permukiman, Pertamanan dan Pemakaman serta Pengelolaan Taman Hutan Raya sesuai dengan kewenangannya.

**b. FUNGSI :**

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat, bidang permukiman, bidang pertamanan dan bidang pemakaman serta pengelolaan taman hutan raya;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perumahan rakyat, bidang permukiman, bidang pertamanan dan bidang pemakaman serta pengelolaan taman hutan raya;
3. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang perumahan rakyat, bidang permukiman, bidang pertamanan dan bidang pemakaman serta pengelolaan taman hutan raya; dan
4. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.



No.	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mewujudkan ruang terbuka hijau yang terpadu dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau yang ramah, asri dan nyaman	<p>Persentase Peningkatan RTH Publik yang dikelola</p> <p>Persentase luas ruang terbuka hijau publik dalam kondisi terpelihara</p>	<p>(Penambahan Luasan RTH Publik yang dikelola / Luasan RTH Publik seharusnya dalam RTRW) x 100%</p> <p>Persentase terlaksananya pengelolaan RTH Publik (RTH Publik yang dipelihara + RTH publik yang dibangun)</p>	<p>Dinas Perumahan Rakyat, Peremukiman dan Pertamanan</p> <p>Bidang Pertamanan dan Pemakaman</p>	RTRW Kota Batam, SKB dan Inventarisasi Lokasi Kerja Pemeliharaan dan Peningkatan RTH	
2	Mewujudkan infrastruktur permukiman yang layak dan terjangkau di wilayah perkotaan	Meningkatnya kualitas sarana prasarana lingkungan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat di wilayah perkotaan	<p>Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman di wilayah Perkotaan</p> <p>Persentase Rumah Layak Huni di Wilayah Perkotaan</p> <p>Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan</p> <p>Persentase Lingkungan Perumahan/ Permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang layak di Wilayah Perkotaan</p> <p>Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan</p>	<p>(% Rumah Layak Huni Perkotaan (+) % Lingkungan Perumahan/ Permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang layak di kawasan perkotaan (+) % Penurunan Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan (+) % Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Perkotaan / 4</p> <p>Jumlah rumah layak huni di wilayah mainland / Jumlah rumah di wilayah permukiman mainland x 100%</p> <p>Jumlah penurunan kawasan kumuh yang tertangani / Jumlah luasan kawasan kumuh di perkotaan x 100%</p> <p>Jumlah lingkungan perumahan/ permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang layak di wilayah mainland / jumlah lingkungan perumahan/ permukiman di wilayah mainland x 100%</p> <p>Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu di wilayah perkotaan / Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu di wilayah perkotaan x 100%</p>	<p>Dinas Perumahan Rakyat, Peremukiman dan Pertamanan</p> <p>Bidang Perumahan Rakyat</p> <p>Bidang Peremukiman</p> <p>Bidang Peremukiman</p>	<p>Data Terpadu Kementerian Sosial (DTKS), SK Kumuh dan Realisasi Peningkatan RTH APBN, APBD 1 dan APBD Kota</p> <p>SK Kumuh, Satker PKP Kota Batam dan Data Realisasi Pemabangunan PSU APBN, APBD 1 dan APBD Kota</p> <p>SK Kumuh, Satker PKP Kota Batam dan Data Realisasi Pemabangunan PSU APBN, APBD 1 dan APBD Kota</p> <p>SK Kumuh, Satker PKP Kota Batam dan Data Realisasi Pemabangunan PSU APBN, APBD 1 dan APBD Kota</p>	

	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	Persentase nilai capaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang tercapai	Sekretariat	Laporan Kinerja Perangkat Daerah dan Hasil Penilaian Kinerja
3	Mewujudkan infrastruktur permukiman yang layak dan terjangkau di wilayah hinterland	<p>Persentase Pemenuhan infrastruktur permukiman di wilayah hinterland</p> <p>Persentase Rumah Layak Huni di Wilayah Hinterland</p> <p>Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh di Wilayah Hinterland</p> <p>Persentase Lingkungan Perumahan/ Permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang layak di Wilayah Hinterland</p> <p>Persentase Peningkatan Infrastruktur Permukiman di Wilayah Hinterland</p>	<p>(% Rumah Layak Huni di Wilayah Hinterland (+) % Lingkungan Perumahan/ Permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang layak di Wilayah Hinterland (+) % Penurunan Luasan Kawasan Kumuh Wilayah Hinterland (+) % Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Hinterland / 4</p> <p>Jumlah rumah layak huni di wilayah hinterland / Jumlah rumah di wilayah permukiman hinterland x 100%</p> <p>Jumlah penurunan kawasan kumuh yang tertangani / Jumlah luasan kawasan kumuh di wilayah hinterland x 100%</p> <p>Jumlah lingkungan perumahan/ permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang layak di wilayah hinterland / jumlah lingkungan perumahan/ permukiman di wilayah hinterland x 100%</p> <p>Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu di hinterland / Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu di hinterland x 100%</p>	<p>Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan</p> <p>Bidang Perumahan Rakyat</p> <p>Bidang Permukiman</p> <p>Bidang Permukiman</p> <p>Bidang Permukiman</p>	<p>Data Terpadu Kementerian Sosial (DTKS), SK Kumuh dan Realisasi Peningkatan RTLH APBN, APBD 1 dan APBD Kota</p> <p>SK Kumuh, Satker PKP Kota Batam dan Data Realisasi Pemabangunan PSU APBN, APBD 1 dan APBD Kota</p> <p>SK Kumuh, Satker PKP Kota Batam dan Data Realisasi Pemabangunan PSU APBN, APBD 1 dan APBD Kota</p> <p>SK Kumuh, Satker PKP Kota Batam dan Data Realisasi Pemabangunan PSU APBN, APBD 1 dan APBD Kota</p>

Kepala Dinas Perumahan Rakyat,  
Permukiman dan Pertamanan  
Kota Batam



Drs. Eryudhi Apriadi

Pembina Utama Muda

NIP. 196904251989091001